

BAB V

KESIMPULAN

5.1. KESIMPULAN

Perdagangan internasional umumnya dilakukan oleh suatu negara apabila negara tersebut memiliki suatu produk yang jumlahnya sudah mencukupi kebutuhan dalam negerinya serta memiliki ketersediaan barang yang melimpah. Oleh karena itu negara melakukan perdagangan internasional berupa ekspor maupun impor dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangan tersebut. Saat ini Indonesia menjadi negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dikarenakan kondisi geografisnya yang cocok ditumbuhi tanaman tersebut. Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik di wilayah yang beriklim tropis seperti Indonesia. Daerah penghasil kelapa sawit terbanyak di Indonesia berada di pulau Sumatera dan Kalimantan. Selain penghasil kelapa sawit terbesar, Indonesia juga merupakan pengekspor CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia. Kebanyakan hasil dari produksi CPO tersebut diekspor ke beberapa negara besar di dunia seperti China, India, dan Uni Eropa. Namun pada saat ini Indonesia justru harus mengalami permasalahan ekspor CPO ke salah satu negara yang menjadi pasar ekspor terbesarnya yaitu Uni Eropa. Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED II (*Renewable Energy Directive II*) yang melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai energi terbarukan. Hal tersebut terjadi karena Uni Eropa menganggap bahwasannya kelapa sawit menjadi salah satu penyebab kerusakan di muka bumi. Dikarenakan Indonesia menjadi produsen sekaligus pemasok CPO terbesar di dunia, banyak negara yang merasa terintimidasi oleh CPO Indonesia yang membuat Indonesia menjadi sorotan dan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari Uni Eropa. (Pranggadia L.A, 2021). Uni Eropa melakukan *Black Campaign* (Kampanye Hitam) melalui berbagai media massa dengan mengatakan bahwasannya CPO tidak ramah lingkungan dan penyebab sebagian besar kerusakan bumi. Alasan Uni Eropa melakukan hal tersebut dikarenakan anggapan bahwasannya kelapa sawit diproduksi dengan tidak memperhatikan lingkungan

yang berkelanjutan. Namun selain itu hal tersebut diyakini karena adanya persaingan dagang yang tidak ingin minyak kelapa sawit lebih berkembang dibandingkan dengan minyak yang dihasilkan oleh Uni Eropa sendiri seperti minyak biji bunga matahari, minyak kedelai, dsb.

Namun dengan adanya kebijakan tersebut Indonesia tidak hanya tinggal diam, akan tetapi berusaha bagaimana agar CPO Indonesia bisa tetap masuk ke pasar Eropa. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan melalui diplomasi komersial atau diplomasi perdagangan. Diplomasi komersial mengedepankan usaha negosiasi dengan negara mitra terkait perdagangan suatu produk dengan tujuan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan dengan tidak menggunakan kekerasan, propaganda, dan juga hukum. Diplomasi komersial merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk melobi Uni Eropa dengan melakukan berbagai langkah yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan perdagangan seperti kerjasama perdagangan, menghadiri atau melaksanakan pertemuan internasional yang resmi untuk proses negosiasi, konsultasi perdagangan, ataupun penyelesaian hambatan. Kemudian dari kegiatan-kegiatan pendukung bisnis seperti kegiatan memperkenalkan perdagangan melalui keterlibatan dalam pameran dagang, seminar, dan melakukan kampanye promosi untuk membangun citra positif negara.

Dalam perdagangan internasional tentu saja terdapat konflik ataupun perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat dari masing-masing negara. Misalnya seperti sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel. Indonesia memberhentikan ekspor nikelnya ke Eropa sebagai bentuk perlawanan atas adanya pelarangan penggunaan minyak nabati kelapa sawit sebagai bahan baku utama untuk biodiesel pada tahun 2021. UE merupakan negara produsen biofuel terbesar membuat sebuah kebijakan untuk memproduksi dan mempromosikan energi terbarukan yang disebut *Renewable Energy Directive* (RED). Dalam kebijakan tersebut mengatakan bahwa berencana menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar di Eropa pada tahun 2030 dan penggunaannya akan dikurangi mulai tahun 2024..

Uni Eropa menganggap minyak kelapa sawit tidak memenuhi kriteria bahan baku biofuel Eropa yang menyebabkan penggundulan hutan, menghasilkan kadar karbon tinggi serta penuh biodiversitas atau bukan daerah bernilai alam tinggi. Beberapa alasan tersebut dianggap telah cukup oleh Uni Eropa untuk menghapus minyak kelapa sawit dari bahan baku biofuel. Namun Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia mengkritik keras kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kebijakan tersebut tentunya akan mengurangi serta menjadi penghambat produksi dan perdagangan pasar minyak kelapa sawit. Negara produsen minyak kelapa sawit seperti Indonesia tentunya akan cemas karena akan kehilangan salah satu pasar terbesar komoditas minyak kelapa sawit. Apalagi kelapa sawit merupakan komoditas andalan Indonesia yang menjadi sumber devisa terbesar negara. Respon Indonesia dapat dilihat dari adanya ancaman untuk memboikot pesawat Airbus dan bus Scania yang merupakan produksi negara Uni Eropa. Selain itu Indonesia akan melaporkan Uni Eropa ke WTO karena kebijakan tersebut dianggap sebagai bentuk diskriminasi non tarif. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa hal tersebut sebagai bentuk perlindungan industri dalam negeri karena kelapa sawit merupakan penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Namun Indonesia tetap mengedepankan Diplomasi Komersial sebagai senjata untuk menghadapi tindakan yang dilakukan oleh Uni Eropa tersebut.

Upaya diplomasi komersial Indonesia terhadap Uni Eropa yaitu :

1. Berperan aktif dalam KTT seperti perundingan kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA), melakukan pertemuan tingkat menteri ASEAN-UE ke 23 diadakan secara online pada Desember 2020, serta upaya melalui WTO.
2. Ekspansi dan promosi seperti promosi kelapa sawit berkelanjutan oleh PT Paya Pinang dengan menerima kunjungan Duta Besar Jerman untuk Indonesia pada bulan Februari 2018. Kementerian Luar Negeri bersama perusahaan kelapa sawit Asian Agri melaksanakan Program Eksekutif Kelapa Sawit pada 16 sampai 18 April 2019 dalam rangka menyambut kunjungan resmi Duta Besar

beberapa negara anggota Uni Eropa, promosi Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) dalam pameran Warsawa Humanitarian Polandia yang bertujuan untuk menyampaikan kepada publik bahwa minyak kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dapat mendukung tercapainya SDGs, promosi kelapa sawit berkelanjutan ISPO dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Perwakilan Uni Eropa di Jakarta, melakukan kampanye bersama (*joint campaign*) oleh produsen minyak sawit terbesar di dunia sebagaimana Indonesia juga Malaysia dalam mengganti pandangan negatif Eropa terhadap minyak sawit.

3. Meningkatkan kerjasama melalui JWG seperti Melaksanakan pertemuan resmi *Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC)* yang terdiri atas negara Indonesia, Malaysia, dan Kolombia. Kemudian kerjasama dengan Belanda terkait produksi sawit berkelanjutan, kunjungan kerja Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara DPR RI dengan Uni Eropa yang dilakukan pada 13 April 2018 di Brussels, Belgia. Menko Kemaritiman melakukan kunjungan kenegaraan ke Vatikan dalam rangka melakukan perundingan pembatasan perdagangan CPO ke Eropa dan meminta dukungan agar CPO tidak terhambat masuk ke pasar Eropa. Melaksanakan pertemuan *The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (MMPOPC)* di Kuala Lumpur, Malaysia. Perjanjian dagang minyak kelapa sawit Indonesia dengan Swiss, dan lobi pemerintah Indonesia terhadap APEC.

Dengan adanya kebijakan RED II yang dilakukan oleh Uni Eropa tentu berpengaruh terhadap penurunan nilai ekspor kelapa sawit Indonesia. Namun hal tersebut membuat Indonesia tidak hanya tinggal diam, namun mencari solusi dengan mencari pasar baru agar ekspor kelapa sawit Indonesia tetap berlangsung, salah satu pasar yang menjadi tujuan Indonesia adalah negara-negara di benua Afrika dan Asia.